

# 7

## **RASIONALITAS ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN MAJENE PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF**

**Irwansyah Mansyur**

Universitas Hasanuddin

Sekretariat KPU Kabupaten Majene

Email : irwansyah\_mansyur@yahoo.com

Editor: Rina Martini – Universitas Diponegoro

---

### **LATAR BELAKANG**

Indonesia sebagai negara demokrasi melaksanakan pemilihan umum yang merupakan sarana legal dalam pergantian kekuasaan. Pemilihan umum juga merupakan ruang evaluasi atas kinerja kepemimpinan selama lima tahunan oleh masyarakat. Dalam tataran praktisnya, pemilu untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari legislatif maupun di eksekutif.

Keikutsertaan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dapat terlihat dari lima pendekatan yakni pendekatan struktural, sosiologis, ekologis, psikologi sosial dan pilihan rasional<sup>1</sup>. Pendekatan struktural akan melihat kegiatan memilih sebagai produk dengan konteks yang luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh partai politik. Pendekatan sosial cenderung menempatkan pemilih pada konteks sosial seperti pemilih memilih karena status sosialnya, ekonomi, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, agama dan pendidikan. Pendekatan ekologis cenderung menilai karakteristik pemilih memilih dikarenakan faktor teritorial seperti desa, kecamatan, kabupaten, propinsi bahkan negara. Pendekatan psikologi sosial yakni pemilih dalam menentukan pilihannya dikarenakan ada keterikatan emosional pemilih dengan partai tertentu. Dan pendekatan rasional yang mana pemilih memilih dikarenakan pertimbangan untung-rugi. Pemilih akan melakukan pertimbangan tertentu mengenai keuntungan yang diperoleh dalam memilih partai atau kandidat tertentu sehingga akan mempengaruhi keputusan memilih atau tidak dalam pemilu.

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.145

Pilihan rasional melihat kegiatan perilaku memilih sebagai produk kalkulasi antara untung dan rugi. Ini disebabkan karena pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih di dalam pendekatan ini diasumsikan memiliki motivasi, prinsip, pendidikan, pengetahuan, dan informasi yang cukup<sup>2</sup>. Pilihan politik yang mereka ambil dalam pemilu bukanlah karena faktor kebetulan atau kebiasaan melainkan menurut pemikiran dan pertimbangan yang logis. Berdasarkan informasi, pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki pemilih memutuskan harus menentukan pilihannya dengan pertimbangan untung dan ruginya untuk menetapkan pilihan atas alternatif-alternatif yang ada kepada pilihan yang terbaik dan yang paling menguntungkan baik untuk kepentingan sendiri (*self interest*) maupun untuk kepentingan umum.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjadi sorotan selama ini adalah partisipasi pemilih untuk hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak suaranya di bilik suara. Legitimasi pemilu sering sekali dikaitkan dengan partisipasi masyarakat dalam memilih. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka legitimasi hasil pemilu dianggap kuat dan begitu pula sebaliknya.

Masyarakat nelayan di Kabupaten Majene juga dalam menentukan pilihan tidaklah lepas dari pertimbangan untung dan rugi. Pilihan-pilihan yang menjadi alternatif dalam keputusan politik mereka dan dipertimbangkan pada alasan yang menjadi tujuan mereka. Kesejahteraan mereka yang rasakan masih kurang bisa menimbulkan keputusan politik yang bisa saja tidak sesuai dengan nilai normatif yang ada. Mereka akan memandang bahwa keuntungan yang mereka peroleh dari pemilihan umum hanyalah keuntungan yang spontanitas saja tanpa memikirkan manfaat pemilu guna aktivitas mereka sebagai nelayan dan bisa saja politik imbalan menjadi pilihan mereka.

Dalam hal Partisipasi masyarakat nelayan dalam politik bisa dilakukan dalam pemilu yaitu sebagai pemilih. Nelayan dalam suatu masyarakat akan berinteraksi dan berada dalam konteks lingkungan yang mencakup orientasi-orientasinya. Orientasi didasarkan pada keinginan dan tujuan-tujuan inilah yang kemudian membentuk pilihan-pilihan politik. Orientasi politik merupakan perilaku individu, sedangkan perilaku berupa kegiatan. Hal ini

---

<sup>2</sup> Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.146

perlu ditegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya. Orientasi politik masih dalam tataran pemikiran individu yang bersifat abstrak, namun setelah itu akan terbentuk sebuah partisipasi politik dan individu akan berperilaku politik yaitu dalam hal memilih pada Pemilu yang juga disebut sebagai partisipasi politik.<sup>3</sup> Orientasi politik ini juga merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih nelayan dalam memilih. tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya termasuk kaum nelayan.

Orientasi politik yang menurut Almond dan Verba meliputi orientasi kognitif, orientasi afektif dan orientasi evaluatif juga dapat dilihat dan diamati dari perilaku nelayan dalam kegiatan politik mereka. Nelayan dalam melaksanakan kegiatan politiknya tentunya dapat dilihat apa yang menjadi latar belakang yang membuat mereka mengambil keputusan untuk memilih. Orientasi-orientasi tersebut dapat dihubungkan dengan aspek tingkat pendidikan dan pengetahuan para nelayan yang mana ketika semakin rendah dapat diasumsikan kemampuan mereka dalam mengenal dan mengetahui tentang visi dan misi partai politik juga akan rendah.

Nelayan di Kabupaten Majene dalam aspek kemampuan mereka dalam mengetahui makna pemilihan umum sehingga membentuk orientasi politiknya sangatlah rendah. Nelayan Kabupaten Majene bukanlah masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang memadai. Kehidupan mereka sedari kecil memang ditempa dengan kehidupan dan kebiasaan-kebiasaan kehidupan nelayan sehingga pendidikan tidaklah menjadi prioritasnya. Hal ini berpengaruh pada tingkat pendidikan mereka yang rendah dikarenakan sekolah bukanlah menjadi prioritas mereka. Dari hal kemampuan pendidikan yang tidak memadai ini pula dapat membentuk orientasi politik para nelayan di Kabupaten Majene.

Demikian juga dengan interaksi para figur politisi yang telah menduduki posisi anggota dewan di tingkat Kabupaten Majene. Mereka terpilih dari hasil pemilihan umum yang juga merupakan pilihan masyarakat nelayan yang penuh dengan harapan untuk kepentingan mereka dalam aktivitasnya sebagai nelayan. Ketika mereka terpilih, yang menjadi perhatian dari para nelayan yakni pola komunikasi yang terbangun antara pihak yang memilih yakni para nelayan dan yang terpilih yakni para anggota dewan yang terpilih. Nelayan di Kabupaten Majene merasa kurangnya perhatian dan tanggapan mereka akan kondisi yang dihadapi oleh para nelayan. Aspek-

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta, hal.141

aspek kehidupan nelayan yang harusnya menjadi perhatian para anggota dewan kabupaten dirasa kurang diperhatikan sehingga nelayan merasa bahwa hasil pemilihan umum kurang memberikan dampak yang baik pada kehidupan mereka.

Kondisi-kondisi seperti ini akan memberikan pengaruh kepada para nelayan terhadap orientasi politik mereka. Ketika orientasi politik ini terbangun maka perilaku memilih nelayan dalam menentukan pilihan juga akan terpengaruhi. Aspek-aspek pengalaman dari pemilihan umum yang lalu akan memberikan dampak pada pilihan politik masyarakat nelayan pada pemilihan umum yang akan datang.

Dari hasil riset awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa hasil yang tidak menentu dalam penangkapan ikan mempengaruhi hubungan *Ponggawa* dan *sawi* pada keseharian nelayan Majene. *Ponggawa* atau di Kabupaten Majene disebut *Juragan* merupakan pemilik kapal atau yang menahkodai kapal yang memiliki kekuasaan akan kapal dan para *sawi* nya atau anak buahnya. Namun karena faktor sulitnya pendapatan dari melaut yang dirasakan oleh para nelayan menyebabkan hubungan juragan dan anak buah ini sekarang hampir tidak ada kesenjangan. Juragan tidak bisa lagi menguasai anak buahnya dalam berbagai hal dikarenakan kemampuan juragan dalam memberikan bantuan ke anak buah juga terbatas. Anak buah diberikan kebebasan oleh juragannya untuk memilih kapal lain atau juragan lain yang lebih mampu untuk melaut.

Permasalahan kesejahteraan ini juga mempengaruhi kemampuan nelayan dalam memiliki tanah hunian sendiri. Para nelayan bermukim di tanah yang bukan milik pribadi mereka. Mayoritas dari mereka hidup di tanah para tuan tanah yang juga merupakan para *maraddia* atau bangsawan yang memiliki lahan yang luas. Mereka ada yang menyewa lahan tersebut ada pula yang diberikan pinjaman lahan kosong tersebut.

Fenomena kehidupan nelayan yang kurang sejahtera ini dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin mengambil keuntungan politik dalam mempengaruhi keputusan politik para nelayan. Hal ini bisa dilakukan oleh para peserta pemilu untuk mengajak dan mempengaruhi masyarakat nelayan untuk memilih mereka atau calon tertentu dalam pemilu. Bagi peserta pemilu, mempengaruhi pemilih dengan iming-iming dan imbalan adalah konsekuensi logis dalam proses politik mereka. Mereka tahu bahwa imbalan dalam mempengaruhi keputusan politik seseorang adalah larangan namun mereka berkilah bahwa hal tersebut adalah biaya politik yang harus dikeluarkan. Masyarakat nelayan pun merasa bahwa keuntungan atau

imbalan yang mereka dapatkan sebelum hari pencoblosan adalah hal yang lumrah sebagai pemberian calon yang sering terjadi dari pemilu ke pemilu.

Dari fenomena sosial dan politik tersebut yang peneliti dapatkan dalam observasi awal ternyata mempunyai hubungan terhadap partisipasi pemilih di TPS-TPS lingkungan nelayan menetap. Partisipasi mereka sangatlah tinggi dan ini terjadi dari pemilu ke pemilu. Nelayan akan memilih untuk mengikuti dan berpartisipasi dalam momen pemilihan umum daripada mereka melaut untuk mencari nafkah sebagai nelayan. Hal ini menarik dikarenakan mereka merasa bahwa bantuan kandidat yang menjadi peserta pemilihan umum yang telah duduk dalam jabatan politik belum dirasakan membantu mengangkat kesejahteraan mereka namun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Penelitian ini akan mengaitkan dengan orientasi politik dari baik orientasi kognitif sekitar, akurat atau tidaknya pengetahuan individu tentang sistem politik yang mencakup beberapa unsur, seperti kesadaran politik ataupun orientasi afektif dari masyarakat yaitu orientasi-orientasi perasaan terhadap politik, atau dengan kata lain, perasaan menerima atau menolak hal-hal yang bersifat politik sehingga dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat nelayan di Kabupaten Majene. Dari uraian diatas maka penulis akan mengajukan penelitian dengan judul “**Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene pada Pemilihan Umum Legislatif**” yang mana penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran baik kepada penyelenggara pemilu sebagai sarana sosialisasi pemilu maupun bagi peserta pemilu baik nasional maupun lokal dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

## **PERMASALAHAN**

Masyarakat nelayan dalam berpartisipasi mengikuti pemilihan umum sangatlah baik dengan ukuran tingginya tingkat partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS-TPS lingkungan nelayan. Partisipasi masyarakat nelayan tersebut bukanlah menjadi ukuran bahwa masyarakat nelayan menyalurkan partisipasinya tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat nelayan dalam menentukan keputusan politiknya. Berdasar atas hal tersebut maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut :

Bagaimana orientasi politik Masyarakat nelayan di Kabupaten Majene dari aspek Kognitif, Afektif dan Evaluatif pada Pemilihan Umum Tahun 2014?

## **KERANGKA TEORI**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan orientasi politik serta pendekatan konsep rasionalitas. Pendekatan-pendekatan tersebut diuraikan sebagai berikut :

### **Konsep Orientasi Politik**

Orientasi politik atau cara pandang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat. Orientasi politik merupakan keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi perilaku politik seseorang yang akan berdampak kepada pilihan pemilih nelayan dalam memilih. tentu saja pada dasarnya pilihan itu dipengaruhi oleh orientasinya. Dalam penelitian ini, hal yang masih dalam pemikiran individu nelayan inilah yang akan dikaji lebih mendalam dalam hal memilih partai politik dan calon-calon legislatif .

Menurut Sjamsuddin, Orientasi seseorang bisa saja berubah sesuai dengan pengetahuan yang didapatnya dan nilai-nilai yang dimilikinya. Nilai-nilai itu dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu, yang dapat berupa informasi, pengetahuan, lingkungan, teman sepermainan, dan sebagainya. Sedangkan faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, berupa pendidikan, keluarga dan sebagainya<sup>4</sup>.

Ketika individu berinteraksi terhadap lingkungannya maka dapat mempengaruhi orientasi individu tersebut. Semakin kaya pengalaman dan interaksi yang individu lakukan maka akan memberikan banyak pertimbangan individu tersebut dalam melakukan keputusan pilihannya. Hal tersebut dikarenakan individu tersebut akan semakin kaya akan perbandingan-perbandingan. Hal ini didorong oleh faktor eksternal dan internal tersebut. Semakin banyak informasi yang individu dapatkan maka semakin baik pula pertimbangan yang akan dia lakukan.

Menurut Gueltom dalam Mesdiastutie, Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogen maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut, yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat.

---

<sup>4</sup> Sjamsuddin, Nazarudin. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1993. Hal. 8

Sehingga dapat terbentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka yang memandang suatu objek politik<sup>5</sup>.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi orientasi politik. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya, sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi orientasi politik antara lain pengaruh elit, identifikasi kepartaian sistem sosial, media massa dan aliran politik.

Dari hasil pendekatan diatas, maka tercipta sebuah model tentang faktor-faktor yang mempengaruhi orientasi politik individu aktor politik sebagai berikut<sup>6</sup>:

- a. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik dan ekonomi, pendidikan dan media massa.
- b. Lingkungan sosial politik langsung seperti situasi yaitu yang mempengaruhi aktor secara langsung, ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti situasi keluarga, situasi ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dalam segala bentuknya.

Almond dan Sidney Verba menyebutkan terdapat tiga komponen orientasi politik<sup>7</sup>. Berikut ini adalah ketiga komponen tersebut:

- a. Orientasi Kognitif, orientasi kognitif adalah komponen yang menyangkut pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Komponen kognitif individu dapat memiliki tingkat pengetahuan tentang segala sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang diambil atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan;
- b. Orientasi Afektif, adalah perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya. Komponen afektif menyangkut aspek perasaan seorang warga negara. Individu dimungkinkan memiliki perasaan yang khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuat individu-individu besikap menerima atau menolak sistem tersebut;

---

<sup>5</sup> Mediastutie, Mega. *Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*. FISIP Unila, 2006. Hal. 15.

<sup>6</sup> Ramlan Surbakti "Memahami Ilmu Politik", PT.Grasindo, Jakarta 1992. Hal; 133

<sup>7</sup> Almond, Gabriel dan Sidney Verba. *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1990. Hal;16

- c. Orientasi Evaluatif, adalah keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Komponen evaluatif ditentukan oleh orientasi moral. Norma yang dianut oleh warga negara menjadi dasar sikap dan perilakunya terhadap sistem politik. Orientasi Evaluatif muncul akibat adanya pengaruh dari orientasi kognitif dan afektif.

Almond dan Powell mencatat bahwa aspek lain yang menentukan orientasi politik seseorang adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).<sup>8</sup> Perasaan ini dalam realitas sosial berwujud dalam kerjasama dan konflik yang merupakan dua bentuk kualitas politik. Rasa percaya mendorong kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bekerjasama dengan kelompok lain. Sebaliknya kelompok-kelompok yang bekerjasama memungkinkan timbulnya konflik. Dengan demikian kerjasama dan konflik tidak saja mewarnai kehidupan masyarakat tetapi juga merupakan ciri budaya politik.

Orientasi politik yang muncul di masyarakat juga dapat dikarenakan adanya perhatian dari pemilih terhadap keuntungan dan kerugian suatu solusi dari permasalahan yang ditawarkan oleh kandidat atau partai politik. Semakin menguntungkan solusi yang menjadi jawaban dari suatu permasalahan di masyarakat maka cenderung pula propabilitas untuk dipilih oleh pemilih. Fiorina (1981) dalam Firmanzah mengungkapkan bahwa pemilih akan menaruh perhatian yang tinggi atas cara kontestan dalam menawarkan solusi dalam suatu permasalahan<sup>9</sup>. Dengan adanya pertimbangan persamaan dan keuntungan dalam pengambilan solusi yang menguntungkan pemilih maka hal ini merupakan manifestasi dari sisi rasionalitas pemilih. Sisi penilaian dan pertimbangan pemilih ini lahir dari suatu kalkulasi yang melibatkan sisi dari pengetahuan serta perasaan dari pemilih dan hal tersebut membentuk orientasi dari pemilih tersebut.

Kaitan antara orientasi politik dengan budaya politik dikemukakan oleh Sjamsuddin bahwa orientasi politik adalah bagian dari budaya politik yang berkembang dimasyarakat<sup>10</sup>. Budaya politik lazimnya sebagai perangkat sikap, kepercayaan, dan perasaan warga negara terhadap sistem politik dan simbol-simbol. Budaya politik dianggap sama dengan konsep ideologi yang

---

<sup>8</sup> Kantapwira, Rusadi, Sistem politik Indonesia, CV. Sinar Baru, Bandung, 1988. Hal. 44

<sup>9</sup> Firmanzah, P.Hd; 2008; Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas; Yayasan Obor Rakyat; Jakarta, Hal 101

<sup>10</sup> Sjamsuddin, Nazarudin. Dinamika Sistem Politik Indonesia. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1993. Hal. 91

dapat berarti sikap mental, pandangan hidup, dan struktur pemikiran. Kebudayaan politik akan sangat terkait dengan struktur politik yang ada di mana budaya politik tersebut berkembang.

Budaya politik yang matang termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik yang demokratis akan mendukung terciptanya sistem politik yang demokratis. Di sini yang dimaksud dengan budaya politik yang demokratis, menurut Almond dan Verba, adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, yang mendorong terwujudnya partisipasi<sup>11</sup>. Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba sebagai *civic culture*. Karena itu, hubungan antar budaya politik dengan demokrasi (demokratisasi) dalam konteks *civic culture* tidak dapat dipisahkan.

Budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Menurut Almond budaya politik dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial Suatu budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif seperti tingkat pendidikan yang rendah. Budaya politik parokial menyatakan ketiadaannya harapan-harapan terhadap perubahan yang diperbandingkan dengan sistem politiknya.
2. Budaya Politik Subyek / Kaula, Budaya politik subyek merupakan dimana masyarakat sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih relatif pasif Budaya politik subyek sering terwujud dalam masyarakat yang tidak terdapat struktur masukan yang diferensiasi.
3. Budaya Politik Partisipan Suatu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Dalam budaya politik partisipan, orientasi politik secara eksplisit ditunjukkan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terdapat struktur, proses politik dan administratif.

Alfian menganggap bahwa lahirnya kebudayaan politik sebagai pantulan langsung dari keseluruhan sistem sosial-budaya masyarakat dalam arti luas.<sup>12</sup> Hal ini terjadi melalui proses sosialisasi politik agar masyarakat mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai politik tertentu yang dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku politik mereka sehari-hari. Adapun nilai-nilai politik yang terbentuk dalam diri seseorang biasanya berkaitan erat

---

<sup>11</sup> Almond, Gabriel dan Sidney Verba. *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1990. Hal;178

<sup>12</sup> Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, halaman 244-245

dengan atau bagian dari nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat itu, seperti nilai-nilai sosial budaya dan agama. Alfian nampaknya menempatkan faktor lingkungan budaya sebagai salah satu faktor penentu orientasi politik seseorang disamping sejumlah faktor lainnya.<sup>13</sup>

### **Konsep Rasionalitas**

Literatur tentang pengambilan keputusan terfokus pada apakah si pengambil keputusan rasional atau tidak rasional. Padahal kata 'rasional' itu sendiri sangatlah susah untuk dipahami. Weber mengungkapkan bahwa rasionalitas dapat dibedakan menjadi rasionalitas nilai (*Value-rational*) dengan rasionalitas tujuan (*goal-rational*).<sup>14</sup> Rasionalitas nilai diartikan sebagai orientasi aksi berdasarkan suatu nilai apakah itu etika, moralitas, agama, hal-hal yang bersifat estetika, kesukaan dan asal-usul. Rasionalitas seseorang individu dinilai sejauh mana individu tersebut mengambil keputusan atas nilai-nilai yang dipegang bukan dari tujuan yang hendak dicapai. Rasionalitas tujuan di sisi lain, diartikan sebagai orientasi keputusan dan aksi berdasarkan kesesuaian dengan tujuan akhir, metode pencapaiannya dan konsekuensinya. Individu akan dinilai rasional ketika keputusan dan aksinya mendukung tujuan akhir.

Miriam Budiardjo berpendapat bahwa individu sebagai makhluk rasional ia akan selalu mempunyai tujuan-tujuan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri<sup>15</sup>. Ia akan melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan arena itu dia harus membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih beberapa alternatif pilihan yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuknya. Rasional seperti ini adalah ketika individu mengambil keputusan maka keputusan itu harus menguntungkan dirinya sendiri. Pilihan akan rasional jika pilihan tersebut menjadi hal yang akan berguna dan memberikan dampak yang baik bagi dirinya. Ketika pilihan tidak mempertimbangkan hal tersebut maka pilihan tersebut tidaklah rasional.

Evans dan Over (1996;1997) membedakan dua konsep rasionalitas<sup>16</sup>. Pertama, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi untuk mencapi tujuan secara efektif dan

---

<sup>13</sup> Alfian, Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1985, halaman 24

<sup>14</sup> Firmanzah, P.Hd; 2008; Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas; Yayasan Obor Rakyat; Jakarta; Hal 93

<sup>15</sup> Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal. 93

<sup>16</sup> Firmanzah, P.Hd; 2008; Marketing Politik, Antara Pemahaman dan Realitas; Yayasan Obor Rakyat; Jakarta; Hal 93

efisien (R1). Rasionalitas seperti ini lebih mengedepankan alasan-alasan pribadi dalam pengambilan keputusan guna pencapaian tujuan personal. Kedua, rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi berdasarkan sebuah sistem normatif tertentu (R2). Rasionalitas seperti ini menekankan pada seberapa besar derajat kesamaan antara keputusan individu dengan *best practice* yang terdapat dan diyakini kebenarannya dalam masyarakat. Semakin sesuai keputusan individu dengan standar sosial, dia semakin dianggap rasional. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak sesuai antara apa yang ingin dicapai dan diwujudkan dengan tujuan masyarakat umumnya, individu tersebut semakin dianggap tidak rasional.

Definisi rasionalitas juga diungkapkan oleh Chater *et al* (2003). mereka membedakan rasionalitas kalkulasi dan rasionalitas deskripsi<sup>17</sup>. Rasionalitas kalkulasi didefinisikan sebagai proses berfikir yang menggunakan teknik probabilitas, logika dan proses pengambilan keputusan. Sementara rasionalitas deskripsi diartikan sebagai derajat keputusan atau perilaku dibandingkan dengan sebuah standar hasil yang ditelurkan rasionalitas kalkulasi. Menurut Linderberg (1985), konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang memiliki preferensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan<sup>18</sup>. Biasanya premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan utilitas. Jadi semakin seorang individu mampu memaksimalkan keuntungan dan sekaligus menekan biaya, dia dianggap semakin rasional. Sebaliknya ketika individu tidak menggunakan rumus dan perhitungan untung dan rugi dalam proses pengambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai makhluk yang sembrono dan tidak rasional.

Firmanzah berpendapat bahwa hubungan politik rasional melihat bahwa interaksi antara partai politik dengan masyarakat penuh dengan alasan-alasan logis dan rasional. Masyarakat akan menilai dan kemudian memilih partai politik dengan program kerja yang paling rasional dan logis. Partai politik melihat bahwa masyarakat adalah entitas yang rasional dan bisa berfikir sehingga partai politik akan mengimplementasikan program kerja yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat<sup>19</sup>.

Boudon (1998) mengungkapkan bahwa dibalik keputusan dan aksi terdapat alasan-alasan yang mendasarinya<sup>20</sup>. Rasionalitas pemilih tidak

---

<sup>17</sup> Ibid; Hal 94

<sup>18</sup> Ibid; Hal 94

<sup>19</sup> Ibid, Hal 235

<sup>20</sup> Ibid, Hal 98

dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu.

Demikian juga yang dikemukakan oleh Converse (1968) bahwa keyakinan politik pada kelas masyarakat yang kurang berpendidikan secara mayoritas terfragmentasi dan *chaotic*. Dia mengemukakan bahwa dalam banyak kasus, keyakinan ini bukanlah dari hasil analisis yang logis dan kalkulatif. Keyakinan tumbuh karena hasil pengalaman dan hal tersebut dipegang teguh oleh masyarakat pada umumnya. Orang dalam pengambilan keputusannya akan sulit dimintai alasan dan argument yang melatarbelakangi keyakinan tersebut. Masyarakat akan melihat bahwa keyakinan dalam mengambil keputusan tersebut adalah begitu adanya dan sulit untuk diganggu gugat dan hal tersebut adalah hal yang rasional bagi mereka.

Mencoblos di bilik TPS dilakukan secara pribadi tanpa disaksikan oleh pihak lain. Proses ini hasil dari pergulatan internal diri pemilih. Adanya aturan bebas dan rahasia menjadikan proses pencoblosan adalah persoalan individu sehingga argumentasi atau alasan masing-masing sangatlah konseptual, bisa disebabkan oleh hitung-hitungan ekonomi atau alasan yang lebih rasional. Jadi definisi rasionalitas ditentukan oleh sejauh mana si pengambil keputusan konsisten terhadap tujuan yang ingin dicapai, terlepas dengan apakah tujuannya sesuai dengan standar normatif yang ada di masyarakat atau tidak. Dalam hal ini, standar normatif masyarakat dinilai sebagai akumulasi dari standar yang dianut oleh masing-masing individu. Ketika terjadi pergeseran nilai pada diri setiap individu, keyakinan masyarakat secara umum pun berubah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rasional ialah suatu pikiran seseorang yang didasarkan pada sebuah pertimbangan akal sehat dan logis. Atau dapat juga dikatakan sebagai sesuatu yang dilakukan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis, pikiran yang sehat, dan cocok dengan akal. Jadi yang dinamakan dengan pilihan rasional ialah suatu pilihan yang didasarkan atas rasio akal sesuai dengan logika pribadi individu masing-masing. Rasionalitas muncul ketika dihadapkan sama banyaknya suatu pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang memberi kebebasan untuk menentukan pilihan, dan menuntut adanya satu pilihan yang harus ditentukan. Suatu pilihan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut diambil dengan maksud untuk memaksimalkan

kebutuhannya. Pilihan rasional yang diambil akan menghasilkan konsekuensi tertentu berupa sikap maupun tindakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono merupakan metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>21</sup>

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan sosial politik masyarakat nelayan akan pemilihan politiknya, yang akhirnya diurai secara mendalam dengan metode kualitatif deskriptif

### **Lokasi dan Waktu penelitian**

Lokasi penelitian yakni kawasan perkampungan nelayan di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur Kabupten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pada kedua Kecamatan ini terdapat Kelurahan yang dihuni oleh Komunitas Nelayan yakni Kampung Tamo dan Nelayan Pangali-ali di Kelurahan Barane Kecamatan Banggae Timur dan Komunitas Nelayan Rangas di Kelurahan Rangas dan kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2018.

### **Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan informan dilakukan secara Purposive yaitu teknik pemilihan informan yang ditetapkan secara sengaja dipilih oleh peneliti dan dianggap mampu memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Peneliti akan memilih Informan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan masyarakat nelayan dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilihan umum.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, hal 1.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara Mendalam**

Jenis wawancara (*interview*) yang dipilih oleh peneliti adalah wawancara secara mendalam (*in-dept interview*). Menurut Sugiyono jenis wawancara ini terbagi menjadi wawancara semiterstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>22</sup> Wawancara semiterstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Kemudian wawancara tidak terstruktur adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi tentang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan mengkombinasikan kedua jenis wawancara tersebut kepada semua informan sebagai teknik pengumpulan data.

### **b. Studi Kepustakaan**

Penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data, membaca tulisan dan melakukan penelusuran terhadap berbagai pustaka dan literatur ilmiah

### **c. Informan**

Penelitian ini nantinya menggunakan teknik *purposive* dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Ketua KPU Kabupaten Majene, yang menjadi koodinator seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Majene.
- 2) Anggota Panwaslu Kabupaten Majene Divisi Pengawasan, sebagai koordinator seluruh pengawasan tahapan pemilihan umum di Kabupaten Majene;
- 3) Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene;
- 4) Kader Partai Politik;
- 5) Tokoh Masyarakat Kabupaten Majene;

---

<sup>22</sup> Sugiyono, 2015. *Op.cit*, hal. 73-74.

**d. Jenis atau Sumber Data**

1. Data primer,  
Data primer penelitian ini adalah semua informasi yang diperoleh secara langsung dari unit analisa yang dijadikan sebagai obyek penelitian.
2. Data sekunder,  
Data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah data yang diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Data dokumentasi berupa dokumen yang terkait pribadi informan.

**e. Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjawab rumusan masalah yang penulis ajukan dalam penelitian tentang rasionalitas orientasi politik masyarakat nelayan pada pemilihan umum di Kabupaten Majene. Peneliti akan menjabarkan orientasi politik masyarakat nelayan dalam tiga aspek yakni aspek orientasi kognitif, aspek orientasi afektif dan aspek orientasi evaluatif.

**Orientasi kognitif**

Dari hasil penelitian dapat tergambar bahwa kepercayaan serta pengetahuan nelayan terhadap politik sangatlah kurang. Mereka tidak bisa memaknai pemilu sebagai sistem demokrasi yang juga merupakan hak dan kewajiban mereka selaku warga Negara. Dari konsep orientasi kognitif dari Almond dan Verba dapat diartikan bahwa Masyarakat Nelayan Majene secara kognitif, orientasi politiknya rendah. Masyarakat nelayan menganggap pemilihan umum hanyalah sekedar memilih figur yang mereka senangi tanpa melihat program dan visi misi yang calon dan partainya bawa. Masyarakat tidaklah melihat partai politik merupakan salah satu unsur dalam sistem politik dalam pemilihan umum. keberadaan partai politik sebagai alat atau kendaraan dari kandidat legislatif bukanlah menjadi pertimbangan mereka dalam membuat keputusan politik sehingga masyarakat nelayan dalam mengambil keputusan politiknya terkesan hanya sebagai memilih tokoh yang

mereka senang saja tanpa memperhatikan kebijakan atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politik secara keseluruhan seperti yang Almond dan Verba maksud.

Demikian juga dengan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang mana para nelayan sebagai individu sangat rendah dalam pemahamannya. Almond dan Verba mengungkapkan bahwa dalam memilih, individu mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara di dalam konstitusi. Hal ini yang kurang dimaknai oleh para nelayan dalam berpolitis. Mereka tidak memaknai pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dalam menyalurkan hak demokrasi mereka. Mereka mengikuti pemilu tanpa faham apa fungsi pemilu untuk kehidupan mereka. Dari hal tersebut, keputusan memilih dari nelayan bukanlah lahir dari pengetahuan politik mereka tetapi cenderung untuk memilih orang sebagai sosok yang disenangi tanpa pertimbangan program serta kebijakan sistem yang melatarbelakangi kandidat tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Almond dan Verba bahwa individu dalam memilih harus mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut.

Ketika nelayan tidak dapat memahami dan mempelajari program partai politik ataupun kandidat maka masyarakat akan mudah mempercayai janji – janji yang akan diumbar oleh partai politik karena mereka bukanlah pemilih yang kritis. Setiap janji yang diberikan oleh partai politik seharusnya dianalisis dan tidak ditelan mentah-mentah. Untuk dapat menganalisis janji tersebut, masyarakat harus memiliki tingkat pemahaman yang baik ditunjang dengan pendidikan agar mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam berpolitik.

Hal ini sesuai pendapat dari Firmanzah bahwa masyarakat rasional adalah masyarakat yang memahami hal-hal yang mereka butuhkan dan harapkan dari suatu sistem politik sehingga mereka akan mengevaluasi setiap program kerja yang ditawarkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Dalam suatu pemilihan umum akan banyak pilihan dan program yang ditawarkan yang sebenarnya harus menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan pilihan yang baik untuk mereka dan hal inilah yang harus dipahami dan dievaluasi. Namun kembali lagi bahwa dengan kemampuan kognitif yang rendah membuat para nelayan memilih dan membuat keputusan bukan dari hasil pemahaman dan evaluasi yang baik.

### **Orientasi Afektif**

Dari penelitian terhadap nelayan maka para nelayan dihadapkan pada keadaan dimana jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu yang

merugikan masyarakat banyak, maka yang timbul adalah perasaan negatif seperti misalnya kekecewaan terhadap Pemerintah. Sebaliknya apabila dihadapkan pada jalannya sistem politik yang menghasilkan sesuatu yang baik bagi masyarakat, maka akan menghasilkan perasaan positif misalnya senang dan bangga.

Perasaan positif dan negatif yang timbul dalam diri dapat menentukan orientasi politiknya. Dengan munculnya perasaan positif pada diri masyarakat maka akan menimbulkan “rasa percaya” (*trust*) dan sebaliknya jika perasaan negatif yang muncul maka akan menimbulkan rasa “permusuhan” (*hostility*). Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (*trust*) dan “permusuhan” (*hostility*).

Nelayan sebagai individu akan muncul rasa percayanya jika janji yang pernah diucapkan oleh kandidat sebelum terpilih dan mereka anggap sebagai hal yang dapat membantu mereka dalam beraktifitas sebagai nelayan itu terpenuhi. Hal ini dapat terlihat dengan komunikasi dan interaksi anggota dewan yang telah terpilih yang tetap menjalin hubungan dengan para nelayan dan ada pula yang tidak lagi menjalin komunikasi dengan mereka. Rasa percaya itu juga akan muncul jika interaksi para anggota dewan ini tetap terjalin dengan mereka walaupun bukan dimasa menjelang pemilihan umum saja. Namun sebagian nelayan kurang dapat lagi percaya dengan para kandidat yang ada dikarenakan pengalaman yang mereka dapatkan selama kandidat ini terpilih di pemilu sebelumnya yang tidak memberikan manfaat bagi mereka. Kesan yang mereka dapatkan adalah kesan yang bernilai negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan lagi terhadap sebagian kandidat tersebut. Rasa percaya yang kurang ini berujung pada rasa permusuhan seperti yang dimaksud oleh Verba dan Powell terhadap mereka para kandidat sehingga apapun yang kandidat dimaksud bawa sebagai program tidaklah dapat mempengaruhi pilihan para nelayan.

### **Orientasi Evaluatif**

Dalam hal orientasi evaluatif para nelayan di Kabupaten Majene dari keputusan mereka tidak lagi melihat program yang dibawa oleh para kandidat atau visi dan misi partai politik. Mereka akan lebih cenderung memilih karena figur yang mereka senangi tanpa ada penilaian terhadap partai politik yang menjadi kendaraan politik figur tersebut. Keputusan memilih juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang nelayan rasakan dari pemilu sebelumnya yang mana pengalaman tersebut akan menimbulkan rasa percaya terhadap kandidat atau rasa permusuhan terhadap kandidat

tersebut. Jika figur tersebut dinilai memberi kesan positif, maka mereka para nelayan akan percaya dan memilih lagi. Tetapi jika muncul rasa tidak suka atau permusuhan maka tidak akan dipilih lagi.

Keputusan dalam memilih juga dapat dilihat dari perasaan saling keterikatan dalam relasi Patron Klien yang ada pada masyarakat nelayan. Hubungan ini dikaitkan dengan model patron-klien yang berlaku dikalangan masyarakat nelayan di Kabupaten Majene. Hubungan patron-klien ini yang di nelayan Suku Mandar dinamai hubungan *Ponggawa* atau juragan dengan *sawi* atau anak buah. Hubungan juragan dan *sawi* di Kabupaten Majene adalah hubungan yang sangat berpengaruh dalam aktifitas melaut. Juragan menurut mereka terbagi atas dua jenis yakni juragan pemilik kapal dan juragan nahkoda kapal. Sedangkan *sawi* adalah orang yang menjadi anak buah dari juragan tersebut yang ikut serta di kapal juragan.

Yang cenderung sangat berpengaruh adalah hubungan patron klien antara pemilik lahan tempat tinggal dan para nelayan. Arahan pemilik lahan adalah suatu keharusan yang harus diikuti oleh para penyewa lahan. Ketika tidak mengikuti arahan maka ada konsekuensi yang harus mereka terima yakni tidak diizinkan lagi untuk tinggal di tempat yang selama ini mereka tempati.

Nelayan yang memilih untuk mengikuti keputusan para pemilik lahan berdalih jika memilih dikarenakan arahan dari pemilik lahan adalah suatu keuntungan bagi mereka. Hal ini sesuai dengan konsep rasionalitas Evans dan Over yang menyatakan bahwa rasionalitas diartikan sebagai berfikir, berbicara, berargumen, mengambil keputusan dan beraksi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rasionalitas seperti ini lebih mengedepankan alasan-alasan pribadi dalam pengambilan keputusan guna pencapaian tujuan personal. Jadi dengan memilih untuk ikut dalam arahan pemilik lahan adalah hal yang rasional dengan mengedepankan alasan pribadi mereka yakni bertahan hidup di lahan pinjaman tersebut dan keputusan itu sangat menguntungkan mereka. Ketika mereka para nelayan memilih karena pertimbangan kelangsungan kehidupan mereka untuk bertahan hidup diatas lahan pinjaman maka hal tersebut adalah alasan yang rasional terhadap pilihan politik mereka. Ketika mereka memilih dalam pemilihan umum dengan dasar keamanan dan tidak mau terusik kenyamanannya untuk tinggal dilahan yang ditempatinya dan hal itu menguntungkan bagi mereka para nelayan maka hal tersebut menurut Evan dan Overs adalah pilihan yang rasional bagi mereka.

Keputusan para nelayan juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Linderberg yakni, konsep rasionalitas berangkat dari konsep individu yang

memiliki preferensi dan dihadapkan pada kendala (*constraints*) ketika harus mengambil keputusan. Biasanya premis dasarnya adalah bahwa individu memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan utilitas. Jadi semakin seorang individu mampu memaksimalkan keuntungan dan sekaligus menekan biaya, dia dianggap semakin rasional. Nelayan dianggap memiliki sifat egois, penuh kalkulasi, dan bermaksud memaksimalkan utilitas. Jadi seorang nelayan yang bertempat tinggal di daerah pinjaman yang mengambil keputusan dengan memaksimalkan keuntungan dari pilihannya tersebut dia dianggap semakin rasional. Sebaliknya ketika nelayan tidak menggunakan rumus dan perhitungan untung dan rugi dalam proses pengambilan keputusannya, oleh perspektif ini dia dicap sebagai nelayan yang sembrono dan tidak rasional. Mereka akan yakin betul bahwa keputusan dalam politik akan membawa mereka dalam posisi aman dalam bertempat tinggal. Mengenai kepentingan mereka dalam beraktivitas sebagai nelayan yang harusnya mereka perjuangkan dalam pemilihan umum bukanlah hal yang utama dibandingkan kenyamanan dalam hidup dilahan yang mereka tempati.

Nelayan dalam memilih dikarenakan menerima imbalan adalah suatu bentuk rasionalitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh Boudon bahwa setiap keputusan pasti ada yang mendasari. Rasionalitas pemilih tidak dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu. Ketika standar normatif menerima imbalan untuk memberikan adalah suatu kekeliruan dan menyimpang tetap dikatakan bahwa pilihan itu rasional. Pilihan-pilihan yang menjadi keputusan nelayan adalah keputusan untuk memenuhi kebutuhan mereka walaupun pemenuhan kebutuhan itu hanyalah sesaat sewaktu hari pencoblosan saja.

Dalam pengambilan keputusan politik, masyarakat nelayan tidak lagi memikirkan apa yang menjadi tujuan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Segala aspek yang bersifat norma dan etika bukanlah menjadi dasar dalam pilihan politik mereka. Mereka mengambil keputusan berdasarkan apa yang menjadi tujuan individu mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber bahwa rasionalitas seperti ini adalah rasionalitas tujuan yang mana aksi tersebut hanya dilakukan dengan pertimbangan tujuan individu tanpa mempertimbangkan etika, moralitas agama dan hal-hal yang bersifat estetika. Rasionalitas yang dijalani oleh para nelayan yakni rasionalitas yang tidak lagi didasari oleh nilai yang dikemukakan oleh Weber yang meliputi etika, moralitas, agama dan hal-hal yang bersifat estetika. Politik uang yang terjadi

di masyarakat nelayan di Kabupaten Majene dijadikan sebagai alasan nelayan untuk menjadi alasan pengambilan sikap politik merupakan hal yang sangat tidak pantas dalam etika dan moralitas pemilih dalam pemilihan umum tetapi hal tersebut. mereka menerima imbalan politik sebagai tujuan untuk suatu keuntungan pada saat itu saja dikarenakan mereka menilai bahwa dimasa yang akan datang tidaklah pasti hasil pemilu itu dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Mereka tidaklah mengindahkan bahwa hal tersebut bertentangan dengan etika, moralitas dan agama serta estetika seperti yang dikemukakan oleh weber.

Demikian juga keputusan nelayan ini sesuai dengan pendapat Miriam Budiarto yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu mempunyai tujuan-tujuan yang dianggapnya adalah kepentingan diri sendiri. Dengan situasi terbatasnya sumber daya maka perlu ia membuat pilihan dengan menetapkan alternatif mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang maksimal bagi mereka. Kaitan menerima imbalan dalam pilihan politik akan menjadi logis jika didasari oleh kepentingan pribadi. Mereka beranggapan bahwa hasil pemilu yang lalu tidaklah memberikan harapan pada aktivitas mereka sehingga ketika ada imbalan berupa suap politik maka mereka akan menerimanya dan menilai bahwa itu merupakan keuntungan pribadi yang mereka dapatkan dalam momen pemilihan umum. Ketika pendapat ini dikaitkan dengan keputusan nelayan untuk mengikuti arahan pemilik lahan maka hal tersebut juga merupakan pilihan rasional yang menguntungkan bagi mereka untuk dapat bertahan hidup di lahan yang mereka tinggali.

Converse juga mengungkapkan tentang keyakinan dalam pengambilan keputusan yang bukan dari hasil analisis dan logis melainkan dengan hasil dari suatu pengalaman. Kekurangfahaman masyarakat nelayan akan makna dari pemilihan umum terhadap keberlangsungan aktivitas dan kehidupan ekonominya mempengaruhi keputusan politik para nelayan dengan hanya pertimbangan pengalaman saja. Dengan alasan logis menurut mereka dalam memaknai pemilihan umum pada aspek evaluatif mereka yakni menerima imbalan dalam pemilu ataukah mengikuti arahan pemilik lahan adalah hal yang rasional menurut mereka dengan dipengaruhi atas pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ketika mereka mengambil keputusan tidak berdasarkan pengalaman mereka akan pemilu dimasa lalu maka mereka akan merasa pilihannya tidaklah membawa manfaat bagi mereka. Berbagai bentuk pengalaman yang tidak menguntungkan bagi mereka akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memilih. Ketika mereka merasa bahwa segala program dan visi misi yang peserta pemilihan umum

bawa sebagai janji pemilu tidak bisa mengubah keyakinan mereka untuk kehidupan lebih baik di masa yang akan datang dikarenakan pengalaman-pengalaman di pemilihan umum yang lalu, maka mereka akan menganalisis yang mana yang menguntungkan mereka dan pilihan rasional mereka adalah menerima imbalan politik dan keamanan tinggal mereka di lahan pinjaman daripada memilih program atau visi misi peserta pemilu.

Dari pembahasan tentang orientasi evaluatif para nelayan di Kabupaten Majene dapat tergambarkan bahwa keputusan memilih dari para nelayan dominan bukan dari hasil evaluasi terhadap kinerja dan program kandidat dan partai politik hasil pemilihan umum yang lalu dalam hal ini pemilihan umum Tahun 2014. Hal ini berbeda dengan pendapat Firmanzah bahwa masyarakat rasional adalah masyarakat yang memahami hal-hal yang mereka butuhkan dan harapkan dari suatu sistem politik sehingga mereka akan mengevaluasi setiap program kerja yang ditawarkan untuk pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Masyarakat nelayan justru cenderung mempertimbangkan hal lain diluar dari program kerja partai politik yang ditawarkan. Imbalan politik berupa suap dan keamanan tinggal di lahan pinjama yang merupakan faktor utama sebagai pertimbangan pengambilan keputusan memungkinkan para nelayan untuk dimobilisasi dalam penentuan pilihan politiknya.

Kemampuan orientasi evaluatif dari para nelayan tentunya juga harus didukung oleh kemampuan kognitif dan afektif dari nelayan tersebut. Dengan rendahnya orientasi kognitif yang dimiliki para nelayan maka juga akan mempengaruhi kemampuan nelayan dalam memahami dan menganalisis serta mengevaluasi kinerja partai politik dan para kandidat. Kondisi seperti ini mengakibatkan orientasi evaluatif dari para nelayan hanyalah mempertimbangkan hal-hal diluar dari substansi pemilihan umum yakni pertimbangan keuntungan yang diperoleh dari suatu momen pemilihan umum seperti *money politic* dan keamanan tinggal dilahan sewaan dan faktor itu dominan mempengaruhi keputusan politik mereka.

Pola penentuan keputusan dengan pertimbangan seperti hal tersebut masih akan terus dilakukan oleh para nelayan pada pemilihan umum Tahun 2019. Hal ini dikarenakan belum adanya solusi yang kongkrit terhadap permasalahan mendasar dari para nelayan dalam kemampuan dan kemandirian politiknya. Hal yang paling mendasar adalah kemapanan di aspek kesejahteraan nelayan dan aspek pengetahuan tentang politik dari para nelayan.

Tabel 1  
Matriks Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene

<b>Orientasi Kognitif</b>	
<b>Faktor Pembentuk Aspek Kognitif Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene</b>	<b>Orientasi Kognitif Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU : Melakukan sosialisasi pemilu dengan melibatkan semua jajaran di tiap tingkatan guna meningkatkan pengetahuan tentang pemilu</li> <li>• BAWASLU : melakukan sosialisasi tentang pemahaman pemilu sehingga pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu dimulai dari masyarakat</li> <li>• Partai Politik : Sosialisasi dengan pemasangan simbol-simbol partai, posko-posko aspirasi, ikut serta dalam MUSREMBANG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan tidaklah memilih dikarenakan visi dan misi partai politik yang menjadi peserta pemilu.</li> <li>• Partai politik tidak mampu mempengaruhi nelayan untuk memilih partai karena pengetahuan nelayan tentang visi dan misi mereka.</li> <li>• Hasil wawancara tersebut dapat menggambarkan bahwa kepercayaan serta pengetahuan nelayan terhadap politik sangatlah kurang.</li> <li>• Mereka tidak bisa memaknai pemilu sebagai sistem demokrasi yang juga merepakan hak dan kewajiban mereka selaku warga Negara.</li> <li>• Kemampuan nelayan dalam menyerap program serta visi dan misi dari para peserta pemilihan umum juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam baca tulis dari para nelayan.</li> </ul>

<b>Orientasi Afektif</b>	
<b>Faktor Pembentuk Orientasi Afektif Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene</b>	<b>Orientasi Afektif Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partai politik mencoba untuk menanamkan rasa memiliki para nelayan dengan menawarkan solusi permasalahan mereka sehingga ada rasa nyaman yang dirasakan oleh para nelayan</li> <li>• Penguatan dan Penerapan visi misi partai di masyarakat. Masyarakat akan memberikan penilaian yang positif akan kerja kerja mereka dan akan memberikan ikatan emosional yang kuat karena merasa terwadahi kepentingannya oleh Partai</li> <li>• Pola rekrutmen partai politik yang baik sehingga menghasilkan kader yang unggul dan dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nelayan merasa janji politik partai banyak yang diingkari</li> <li>• Nelayan merasa anggota dewan terpilih kurang bahkan tidak pernah lagi datang setelah terpilih</li> <li>• Munculnya perasaan negatif dan tidak suka dengan pemerintahan</li> <li>• Almond dan Powell mencatat bahwa aspek penting yang menentukan orientasi politik seseorang, adalah hal-hal yang berkaitan dengan “rasa percaya” (<i>trust</i>) dan “permusuhan” (<i>hostility</i>).</li> </ul>

### **Orientasi Evaluatif**

- Nelayan dalam memutuskan pilihan politik tidak melihat program yang dibawa oleh para kandidat atau visi dan misi partai politik.
- Keputusan memilih juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang nelayan rasakan dari pemilu sebelumnya yang mana pengalaman tersebut akan menimbulkan rasa percaya terhadap kandidat atau rasa permusuhan terhadap kandidat tersebut
- Relasi patron klien dalam relasi *Ponggawa Sawi* tidak mempengaruhi keputusan memilih dikarenakan latar belakang relasi ini adalah kekerabatan
- Patron klien yang berpengaruh dalam keputusan politik adalah Tuan Tanah dan nelayan yang menempati lahan tuan tanah. Kepemilikan lahan sangat mempengaruhi keputusan sebahagian nelayan dalam memilih
- Mereka khawatir ketersinggungan pemilik lahan akan membuat kenyamanan mereka menjadi taruhan untuk tinggal di daerah mereka.
- Sebahagian nelayan berpendapat bahwa pemilu kurang memberikan manfaat secara jangka waktu yang panjang. Kesempatan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari pemilu adalah dengan mendapatkan suap untuk hak suaranya.
- Boudon berpendapat Rasionalitas pemilih tidak dapat diukur dengan kesesuaian terhadap standar normatif yang berkembang di masyarakat. Benar atau salah keputusan tersebut ditentukan dengan seberapa jauh hal tersebut sesuai dengan nilai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh masing-masing individu

Setelah mendalami dan mengulas ketiga aspek orientasi politik dari nelayan Kabupaten Majene, maka kaitan dengan budaya politik Almond dan Verba, pada umumnya kecenderungan budaya politik masih tergolong Budaya politik parokial memiliki frekuensi orientasi-orientasi yang rendah terhadap sistem politiknya, ini dapat dilihat dari perhatian masyarakat nelayan Kabupaten Majene intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan (*input*) dan partisipasinya dalam aspek keluaran (*output*) sangat rendah. Subjek individual belum menyadari akan otoritas pemerintah yang memiliki spesialisasi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, ia bahkan

secara afektif mengorientasikan diri bahwa perasaan akan hasil pemilihan umum belum memberikan manfaat yang dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka. Posisinya sebagai warga negara yang memiliki hak demokrasi dalam posisi yang pasif, diyakini bahwa posisinya tidak akan menentukan apa-apa terhadap perubahan politik.

Kondisi masyarakat nelayan yang pasif ini dapat mengarahkan budaya politik yang berlaku pada mereka. Dari pendalaman pertanyaan yang dilakukan, ditemukan kondisi dimana masyarakat nelayan tersebut sangatlah kurang dalam pengetahuannya tentang sistem politik. Pembuktiannya dengan mereka belum mengetahui fungsi utama dari pemilihan umum itu sendiri bahkan belum menjadi sesuatu yang penting yang mempengaruhi aktifitas mereka sebagai nelayan.

Jika melihat ciri budaya politik menurut Almond dan Verba, semakin menguatkan identitas masyarakat nelayan di Kabupaten Majene adalah menganut budaya parokial. Masyarakat nelayan Kabupaten Majene hidup di suasana yang tradisional dengan pola hidup yang sederhana. Kehidupan mereka hanyalah diwarnai dengan komunikasi dan interaksi sesama nelayan mengenai aktifitas mereka sebagai nelayan. Dengan pernyataan-pernyataan mereka sebagai informan dalam wawancara menyatakan bahwa mereka tidaklah menaruh minat yang banyak terhadap dinamika politik yang terjadi. Ini dikarenakan ternyata dari pemilu ke pemilu tidaklah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan mereka. Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan ini membawa nelayan pada posisi pasif dalam berdemokrasi walaupun mereka tetap ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Hal yang menarik yakni, menurut Almond dan Verba, Budaya Politik Parokial Suatu budaya politik yang mempunyai tingkat partisipasi politik sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif seperti tingkat pendidikan yang rendah. Walaupun faktor kognitif tidak mendukung kemampuan para nelayan untuk memaknai makna demokrasi dalam pemilihan umum dan ditunjang dengan pendidikan yang rendah, namun mereka tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum. Mereka tetap meninggalkan aktivitas mereka sebagai nelayan untuk menyalurkan aspirasi mereka di TPS. Tetapi partisipasi mereka tidaklah didasarkan oleh keputusan dalam memperjuangkan kepentingan mereka di kemudian hari tetapi hanya didorong oleh kepentingan sesaat saja seperti politik uang atau keamanan tempat tinggal mereka.

Minat mereka dalam pengertian politik itu hanya bersifat lokal, bukanlah secara luas atau nasional. Pilihan pilihan politik bukan dilandasi oleh visi dan misi partai atau calon legislatif tetapi adanya kedekatan khusus

dengan calon tertentu. Mereka dalam menentukan pilihan politiknya tidaklah membandingkan program atau gagasan serta visi dan misi yang dibawa oleh para peserta pemilihan umum. Semua fakta yang ditemukan mengarahkan bahwa Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene cenderung berbudaya politik parokial.

Dengan budaya politik parokial yang dianut oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Majene maka kecenderungan pola orientasi politik yang ada pada Pemilihan Umum Tahun 2014 akan tetap relevan menjadi orientasi politik nelayan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Nelayan belum mengalami pergeseran orientasi karena dinamika politik yang mereka rasakan masih belumlah berubah dari pemilihan umum sebelum-sebelumnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Orientasi Kognitif Masyarakat nelayan Kabupaten Majene memiliki kenderungan pengetahuan sangatlah minim. Mereka tidak dapat menangkap visi dan misi serta program yang dibawa oleh partai politik peserta pemilihan umum. Mereka memaknai pemilihan umum hanyalah kegiatan rutin biasa tanpa banyak mengerti manfaat bagi mereka. Kurangnya pengetahuan tersebut akan memunculkan kerawanan dalam hal partisipasi yang dimobilisasi dengan politik transaksional. Pembentukan orientasi kognitif masyarakat nelayan di Kabupaten Majene harus menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan pemilihan umum di Kabupaten Majene agar Nelayan dapat memilih pilihan politiknya untuk harapan memperbaiki aktivitas mereka sebagai nelayan.
- b. Dari orientasi afektifnya, para nelayan di Kabupaten Majene merasa bahwa pemilu tidaklah membawa perubahan dari kehidupan mereka. Segala janji yang mereka pernah terima dalam penyelenggaraan pemilihan umum dari peserta ternyata kurang yang terbukti sehingga menimbulkan rasa tidak percaya lagi terhadap hasil pemilihan umum. rasa tidak percaya yang dimiliki oleh nelayan ini membuat nelayan dalam menetapkan pilihannya tidak lagi mempertimbangkan status petahana yang telah duduk sebagai legislatif tapi akan cenderung memilih dikarenakan keuntungan apa yang mereka dapatkan pada pemilihan umum tersebut baik *money politic* atau keamanan hidup di lahan sewaan.
- c. Orientasi evaluatifnya yakni mereka akan tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum tetapi bukan didorong oleh sikap kognitif dan afektifnya

yang mana pemilihan umum yang lalu bukan bisa menjadi pengetahuan memilih bagi mereka dan juga kekecewaan dengan hasil pemilu yang lalu merupakan suatu realitas bahwa hasil pemilu tidaklah memberikan banyak keuntungan bagi mereka sebagai nelayan. Nelayan dalam mengambil keputusan memilih mereka lebih mempertimbangkan keamanan hidup mereka tinggal di lahan pinjaman dan juga karena maraknya politik uang atau *Money Politic*.

### **Saran**

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti merekomendasikan beberapa hal yaitu :

- a. Semua pemangku kepentingan pemilihan umum harus mengambil peran yang lebih besar lagi dalam membangun kesadaran demokrasi dikalangan masyarakat nelayan Kabupaten Majene dengan melaksanakan sosialisasi yang berkesinambungan. Dengan sosialisasi yang berkesinambungan diharapkan pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi tetap ada dan meningkat dari segi kualitasnya sehingga dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas pula.
- b. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus membangun komunikasi yang baik dengan tokoh-tokoh partai politik dan nelayan untuk dapat mencegah praktek-praktek kecurangan pemilu di masyarakat nelayan. Praktek penyimpangan aturan pemilu akan mudah dicegah apabila penyelenggara pemilu dapat berkoordinasi dengan baik dengan peserta pemilu.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Majene memikirkan dan memfasilitasi masyarakat nelayan untuk dapat memiliki perumahan sendiri dengan membuat lokalisasi perkampungan nelayan. Dengan pemilikan lahan yang dimiliki sendiri oleh para nelayan akan memberikan kekuatan keputusan politik para nelayan untuk dapat memilih sesuai dengan pilihan politiknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. *Budaya Politik*. Jakarta: Bina Aksara, 1990.
- Andika Meymulyana, *Peran pemilihan Umum Rayadalam membangun kesadaran berorganisasi mahasiswa (Tesis)*, Universitas Pasundan, 2016, Bandung
- Azwar, S. *Sikap Manusia : Teori dan Pengukuran*. Liberty.Yogyakarta.2000
- Colemen, *Rational Choice Theory*, 1994,. Lihat Terjemahan, Nono Warsono, *Teori Pilihan Rasional*, IAIN Syaikh Nurjati: Cirebon,2010.
- Dennis Kavanagh, *Political Science and Political Behavior*, dalam FS Swartono, dan Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana, Jakarta,1992,
- Faisal, Snapiah. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Usaha-Usaha Nasional. Surabaya. 1990
- Firmanzah,P.Hd; *Marketing Politik, Antara Pemahaman dn Realitas*;Yayasan Obor Rakyat; Jakarta 2008
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Posmodern*,(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008)
- Jack C. Plano, Robert E. Ringgs, Helenan S. Robin. 1985. *Kamus Analisa Politik*. Rajawali Press. Jakarta.1985
- Khoirudin. *Partai Politik dan Agenda Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Krisnawati ,Ester, S.Sos., M.I.Kom, *MEDIA KREATIF SEBAGAI SIKAP POLITIK PEMUDA INDONESIA*, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Satya Wacana (Jurnal). 2015
- Martin, Roderick. *Sosiologi Kekuasaan*. CV. Rajawali. Jakarta,1990.
- Michael Rush dan Phillip Althoff. *Pengantar Sosioogi Politik*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Mediastutie, Mega. *Orientasi Politik Mahasiswa Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*. FISIP Unila, 2006.
- Norman K Denzin dan Yvonna S. Lincoln,. *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan). Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009
- Prihatmoko, Joko J. *Pemilihan Kepala daerah langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

- Rakhmat, Jalaluddin. Psikologi Komunikasi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.1992
- Rizanul Ihsan, (tesis), Rasionalitas Masyarakat Kepulauan dalam Memilih Pemimpin – Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di Desa Sepanjang, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015
- Rohrschneider, R. Mobilizing versus Chasing : “How do parties target voters in election campaigns?”, Electoral Studies, 2002.
- Sapto Supono, *Peranan Pemerintah Dalam Pilkada dan Potensi Permasalahan Pilkada*, dalam Seminar Nasional *Dilema-dilema Pilkada Langsung*, Puskodak Undip, Semarang, 2005,
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Pustaka. LP3ES Indonesia, Jakarta, 2008.
- Sjamsuddin, Nazarudin. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta,1993
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo, Jakarta. 1992
- Widayatun, Tri Rusmi. *Ilmu Perilaku*. Sagung Seto. Jakarta,1999
- Yesmil Anawar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo , Bandung: 2008